

# **PENGADILAN AGAMA DEMAK**

## **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019**

Jl. Sultan Trenggono No. 23

Demak - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014

e-mail : [pademak01@gmail.com](mailto:pademak01@gmail.com)



**LAPORAN KEUANGAN**  
**PENGADILAN AGAMA DEMAK**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Sultan Trenggono No. 23**

**Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014**

**Demak - Jawa Tengah 59516**

**e-mail : pademak01@gmail.com**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Demak adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Demak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demak, 2 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



HAMMAD AL-ASY'ARI, S.H.  
NIP.198010122003121003

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	13
II. Neraca .....	15
III. Laporan Operasional.....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	24
A. Penjelasan Umum .....	24
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	41
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya .....	58
Daftar dan Lampiran .....	71
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	72
Daftar Hibah Langsung.....	75

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Agama Demak

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014 e-mail : pademak01@gmail.com

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak Semester II Tahun 2019 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 2 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



HAMMAD AL-ASY'ARI, S.H.

NIP.198010122003121003



# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Demak Semester II Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp468.900,- atau mencapai 111,64 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp420.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp4.290.818.544,- atau mencapai 99,65 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.306.010.000,-.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2019 dan 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp18.269.239.718,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.011.400,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp18.275.078.168,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp7.400.000,- Aset lain-lain Rp.159.899.373,- Akumulasi penyusutan/ Amortisasi asset lainnya Rp(162.399.373,-).

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp13.749.850,- dan Rp18.269.239.718,-.

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO

untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp468.900,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4.686.170.682,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(4.685.701.782,-) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp(4.684.024.182,-) sehingga entitas mengalami surplus (defisit)-LO sebesar Rp(4.684.024.182,-).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp16.137.531.972,-, dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar Rp(4.684.024.182,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp2.354.480.094,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.461.251.834,-, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp18.269.239.718,-.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA DEMAK**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	420.000	468.900	111,64	694.897
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>420.000</b>	<b>468.900</b>	<b>111,64</b>	<b>694.897</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.318.267.000	3.317.077.386	99,96	3.986.310.573
2.	Belanja Barang	B.2.2.	937.743.000	923.741.158	98,51	812.903.472
3.	Belanja Modal	B.2.3.	50.000.000	50.000.000	100,00	287.201.500
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>4.306.010.000</b>	<b>4.290.818.544</b>	<b>99,65</b>	<b>5.086.415.545</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA DEMAK**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 2.	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C. 3.	0	0
Persediaan	C. 4.	3.011.400	9.334.650
Jumlah Aset Lancar		3.011.400	9.334.650
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C. 5.	11.486.068.000	10.082.286.000
Peralatan dan Mesin	C. 6.	2.034.884.256	1.813.982.066
Gedung dan Bangunan	C. 7.	6.662.469.089	5.670.281.089
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 8.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 9.	43.184.651	43.184.651
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 10.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 11.	(1.951.527.828)	(1.472.886.374)
Jumlah Aset Tetap		18.275.078.168	16.136.847.432
<b>Aset tak Berwujud</b>			
Aset tak Berwujud	C. 12.	7.400.000	7.400.000
<b>Aset Lain-Lain</b>			
Aset Lain-Lain	C. 13.	159.899.373	159.899.373
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C. 14.	(162.399.373)	(162.399.373)
Jumlah Aset Lainnya		4.900.000	4.900.000
<b>Jumlah Aset</b>		<b>18.282.989.568</b>	<b>16.151.082.082</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			

Kewajiban Jangka Pendek				
	Utang kepada Pihak Ketiga	C. 15.	13.749.850	13.550.110
	Uang Muka dari KPPN	C. 16.	0	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		13.749.850	13.550.110
	Jumlah Kewajiban		13.749.850	13.550.110
<b>EKUITAS</b>				
	Ekuitas	C. 17.	18.269.239.718	16.137.531.972
	Jumlah Ekuitas Dana		18.269.239.718	16.137.531.972
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		18.282.989.568	16.151.082.082

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA DEMAK**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	468.900	694.846
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>468.900</b>	<b>694.846</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	3.319.077.827	3.978.150.052
Beban Persediaan	D. 3	32.027.850	23.027.335
Beban Barang dan Jasa	D. 4	551.274.807	465.859.466
Beban Pemeliharaan	D. 5	293.548.650	281.252.783
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	53.090.000	55.656.787
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	517.295.689	359.155.448
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>4.686.170.682</b>	<b>5.163.101.871</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(4.685.701.782)</b>	<b>(5.162.407.025)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
	D. 11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>1.677.600</b>	<b>(242.014)</b>

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(4.684.024.182)	(5.162.649.039)
<b>Pos Luar Biasa</b>	<b>D. 12</b>	
Pendapatan PNPB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
<b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>	<b>(4.684.024.182)</b>	<b>(5.162.649.039)</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA DEMAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	E. 1	16.137.531.972	10.543.067.172
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(4.684.024.182)	(5.162.649.039)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	2.354.480.094	5.671.393.191
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	2.395.970.000	6.382.909.271
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	(41.489.906)	(711.516.080)
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Transaksi Antar Entitas	E. 4	4.461.251.834	5.085.720.648
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>18.269.239.718</b>	<b>16.137.531.972</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi



Pemerintah Pusat.

- l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
- q. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Demak

### Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak

Rencana strategis Pengadilan Agama Demak tahun 2015-2019 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan indikator tujuan, sasaran dengan indikator sasaran dan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

### Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak

Visi Pengadilan Agama Demak adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama demak yang mandiri dan profesional dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung."

Misi Pengadilan Agama Demak adalah:

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Demak melakukan beberapa langkah-langkah strategis yaitu melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tentang Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Demak melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen yang jelas dan terukur;
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan adil;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas profesional;
7. Pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektif;
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan;
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

---

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Demak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

---

Pengadilan Agama Demak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### A.5. Dasar Pengukuran

---

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Demak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- ) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- ) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2.) Pendapatan LO

- ) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- ) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan persekot gaji

- Pendapatan Sewa tanah, Gedung dan bangunan.
  - Pendapatan atas Tagihan tuntutan ganti rugi (TGR).
- ) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3.) Belanja**

---

- ) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- ) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- ) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- ) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **(4.) Beban**

---

- ) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- ) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- ) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **(5.) Aset**

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### **a. Aset Lancar**

---

- ) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk

valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

- ) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- ) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- ) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- ) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- ) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

### d. Piutang Jangka Panjang

- ) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- ) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai



nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- ) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- ) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- ) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- ) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## (6.) Kewajiban

---

- ) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- ) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## (7.) Ekuitas

---

- ) Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Demak telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	TAHUN 2019	
	ANGGARAN AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penadapatan Lain-lain	468.900	468.900
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>468.900</b>	<b>468.900</b>
Belanja		
Belanja Pegawai	4.779.477.000	3.318.267.000
Belanja Barang	826.792.000	937.743.000
Belanja Modal	25.000.000	50.000.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.631.269.000</b>	<b>4.306.010.000</b>

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara  
dan Hibah :  
Rp468.900*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.468.900,- atau mencapai 111,64 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.420.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Demak adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019**

*(dalam satuan Rupiah)*

Akun	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	420.000	468.900	111,64
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>420.000</b>	<b>468.900</b>	<b>111,64</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp.(225.946) atau (32,51)persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena:

1. Tidak adanya aktivitas penerimaan kembali porsekot/ uang muka gaji;
2. Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor

Pengadilan Agama Demak;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019 dan 2018

(dalam satuan Rupiah)

Akun	Uraian	TA 2019	2018	Perubahan	
				Rp	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	468.900	694.846	(225.946)	(32,51)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	51	(51)	(100,00)
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
<b>Total Pendapatan</b>		<b>468.900</b>	<b>694.897</b>	<b>(1225.997)</b>	<b>(32,52)</b>

## B.2. Belanja

Realisasi  
Belanja  
Negara :  
Rp  
4.290.818.544

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Demak per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp.4.290.818.544,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,65% dari anggaran senilai Rp.4.306.010.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian	31 Desember TA 2019		
		Pagu	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	3.318.267.000	3.317.077.386	99,96
52	Belanja Barang	937.743.000	923.741.158	98,51
53	Belanja Modal	50.000.000	50.000.000	100,00
<b>Total Belanja Bruto</b>		<b>4.306.010.000</b>	<b>4.290.818.544</b>	<b>99,65</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Belanja Netto</b>		<b>4.306.010.000</b>	<b>4.290.818.544</b>	<b>99,65</b>

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar (Rp.795.597.001,-) atau sebesar (15,64) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan realisasi belanja pegawai 2019 menurun karena mutasi 4 orang Hakim. Serta

menurunnya anggaran belanja modal.

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
				Rp	%
51	Belanja Pegawai	3.317.077.386	3.986.311.234	(669.233.848)	(16,79)
52	Belanja Barang	923.741.158	812.903.472	110.837.686	13,63
53	Belanja Modal	50.000.000	287.201.500	(237.201.500)	(82,59)
Total Belanja		4.290.818.544	5.086.416.206	(795.597.662)	(15,64)

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi  
Belanja  
Pegawai :  
Rp  
3.317.077.386

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Demak per 30 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 3.317.077.386,- dan Rp. 3.986.310.573,-.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami penurunan sebesar 16,79 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain adanya mutasi keluar empat orang Hakim dan 1 orang Wakil ketua tanpa ada mutasi yang masuk.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.312.422.620	1.344.376.300	(31.953.680)	(2,38)
Beban Pembulatan Gaji PNS	19.864	19.426	438	2,25
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	114.672.050	111.979.210	2.692.840	2,40
Beban Tunj. Anak PNS	38.156.894	39.000.038	(843.144)	(2,16)
Beban Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	0	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.360.510.000	1.923.640.000	(563.130.000)	(29,27)
Beban Tunj. PPh PNS	169.640.001	228.418.000	(58.777.999)	(25,73)
Beban Tunj. Beras PNS	69.812.880	72.637.260	(2.824.380)	(3,89)

Beban Uang Makan PNS	213.410.000	229.841.000	(16.431.000)	(7,15)
Beban Tunjangan Umum PNS	2.035.000	0	2.035.000	100,00
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>3.317.079.309</b>	<b>3.986.311.234</b>	<b>(669.233.187)</b>	<b>(16,79)</b>
Pengembalian Belanja	(1.923)	(661)	(1.262)	190,92
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>3.317.077.386</b>	<b>3.986.310.573</b>	<b>(669.233.187)</b>	<b>(16,79)</b>

### B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp923.741.158*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Demak per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp.923.741.158,- dan Rp. 812.903.472,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 13,63 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain adanya tambahan anggaran BA BUN yaitu Langganan Internet dedicate, bantuan sewa rumah dinas bagi hakim serta tambahan untuk anggaran jasa langganan listrik pada Anggaran DIPA tahun 2019.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
<b>Belanja Barang Operasional</b>	<b>411.720.696</b>	<b>329.560.892</b>	<b>82.159.804</b>	<b>24,93</b>
Belanja Barang Non Operasional	0	8.901.000	(8.901.000)	(100,00)
Belanja Jasa	165.381.812	137.532.010	27.849.802	20,25
Belanja Pemeliharaan	293.548.650	281.252.783	12.295.867	4,37
Belanja Perjalanan Dinas	53.090.000	55.656.787	(2.566.787)	(4,61)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>923.741.158</b>	<b>812.903.472</b>	<b>110.837.686</b>	<b>13,63</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>923.741.158</b>	<b>812.903.472</b>	<b>110.837.686</b>	<b>13,63</b>

### B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi  
Belanja  
Modal :  
Rp50.000.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Demak per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp. 287.201.500,-.

Realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami penurunan sebesar (26,50) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya anggaran DIPA belanja modal dari tahun 2018.
2. Tidak maksimalnya serapan dikarenakan penawaran terendah dalam lelang sehingga menyisakan anggaran.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	50.000.000	280.261.500	(230.261.500)	(82,16)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>50.000.000</b>	<b>280.261.500</b>	<b>(230.261.500)</b>	<b>(82,16)</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>50.000.000</b>	<b>280.261.500</b>	<b>(230.261.500)</b>	<b>(82,16)</b>

#### B.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan TA 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### B.2.5 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2019 dan TA 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp	%
<b>Belanja Modal Jaringan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

### B.2.6 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2018.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2019 dan TA 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp	%
<b>Belanja Modal Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0



## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset  
Lancar: Rp  
3.011.400

### Aset Lancar

#### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Benda  
hara  
Pengel-  
uaran:  
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2019	31 Desember TA 2018
1	Uang tunai di brankas	0	0
Jumlah		0	0

Kas di Bendahara Pengeluaran telah di setor ke rekening kas Negara dan GU Nihil di setorkan pada akhir semester II tahun 2019.

#### C.2. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Belanja  
Dibaya-  
r di  
Muka:  
Rp0

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Kas di Belanja Dibayar di Muka  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2019	31 Desember TA 2018
1	Uang tunai di brankas	0	0
Jumlah		0	0

### C.3.Persediaan

*Persediaan:*  
*Rp3.011.400*

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.3.011.400,- dan Rp. 9.334.650,-. Terjadi penurunan sebesar Rp.(6.323.250,-) atau sebesar (67,74)%. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

#### Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	3.011.400	9.334.650
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3	Persediaan lainnya	0	0
Total		3.011.400	9.334.650

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan per 31 Desember 2019 Pengadilan Agama Demak. Jumlah persediaan yang rusak/usang yaitu atas barang konsumsi senilai Rp0,00 dan tidak disajikan dalam neraca pada persediaan.

### C.4.Tanah

*Tanah:*  
*Rp11.486.068.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Demak per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 11.486.068.000,- dan Rp. 10.082.286.000,-.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	10.082.286.000
<b>Mutasi Tambah</b>	
Revaluasi Aset Tanah oleh KPKNL Semarang	1.403.782.000
<b>Mutasi Kurang</b>	

-	-
Saldo per 31 Desember 2019	11.486.068.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	11.486.068.000

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :  
**Rincian Saldo Tanah**

Jenis BMN	NUP	Tanah Milik Sendiri			Luas Tanah (m2)	Nilai Perolehan
		No dan Tanggal Sertifikat	Alamat Lokasi Tanah	Kepemilikan Atas Nama		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	11.09.07.21.4.00070 Tanggal 12 Nopember 2012	Jl. Sultan Trenggono No.23 Demak	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	7.546	11.486.068.000
<b>Jumlah</b>						<b>11.486.068.000</b>

### C.5.Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin : Rp 2.034.884.256*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.034.884.256,- dan Rp. 1.813.982.066,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	1.813.982.066
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	50.000.000
Transfer Masuk Eselon 1	170.902.190
<b>Mutasi Kurang</b>	
-	-
Saldo per 31 Desember 2019	2.034.884.256
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(1.478.772.371)
Nilai Buku 31 Desember 2019	556.111.885

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Mutasi tambah yang terjadi pada Pengadilan Agama Demak antara lain :

1. Pembelian

Pengadaan Sarana dan Prasarana Internal berupa Pengadaan Laptop untuk Hakim berdasarkan SP2D No. 191291303003209 dan 191291303003778 dicatat sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp.50.000.000,00;

2. Transfer Masuk

Transfer masuk berupa alat pengolah data dan komunikasi pendukung e court dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 115/BUA.7/BAST/BMN-BUN/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019 di catat sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp.170.902.190,00;

### C.6.Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp  
6.662.469.089*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp6.662.469.089,- dan Rp.5.670.281.089,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	5.670.281.089
<b>Mutasi Tambah</b>	
Revaluasi Aset Gedung dan Bangunan oleh KPKNL Semarang	992.188.000
<b>Mutasi Kurang</b>	
Saldo per 31 Desember 2019	6.662.469.089
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(472.755.457)
Nilai Buku 31 Desember 2019	6.189.713.632

Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya revaluasi Asset Gedung dan

Bangunan Pengadilan Agama Demak oleh KPKNL Semarang.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.7. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp  
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0.

### C.8. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp  
43.184.651*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.43.184.651,- dan Rp. 43.184.651,-.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	43.184.651
<b>Mutasi Tambah</b>	
-	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
-	0
Saldo per 31 Desember 2019	43.184.651
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	43.184.651

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.9. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi  
dalam  
Pengerjaan : Rp  
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset tetap : Rp  
(1.951.527.828)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp(1.951.527.828) dan Rp(1.472.886.374).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.034.884.256	(1.478.772.371)	535.577.231
2	Gedung dan Bangunan	6.662.469.089	(472.755.457)	5.475.799.550
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	43.184.651	0	43.184.651
	Jumlah	8.740.537.996	(1.951.527.828)	6.789.010.168

### C.11. Aset tak berwujud

*Aset tak  
Berwujud :  
Rp 7.400.000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.7.400.000 dan Rp. 7.400.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutase transaksi ATB per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	7.400.000
<b>Mutasi Tambah</b>	
-	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
-	0
Saldo per 31 Desember 2019	7.400.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	2.500.000
Nilai Buku 31 Desember 2019	4.900.000

### C.12. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :  
Rp 159.899.373*

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 159.899.373 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Demak serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2018	0
<b>Mutasi Tambah</b>	159.899.373
<b>Mutasi Kurang</b>	0
Saldo per 31 Desember 2019	159.899.373
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	159.899.373

Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya rencana mebeulair dan peralatan dan mesin yang telah mengalami rusak berat dan tidak di pakai lagi, yang akan di hapuskan oleh Pengadilan Agama Demak yang direncanakan pada tahun 2019, berdasarkan surat Sekretaris W11-A15/0160/HM.01/I/2019 berupa asset tetap yang tidak digunakan operasi pemerintah. Telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 dengan pejabat lelang Roestam Arifianto, namun dalam pelaksanaannya pemenang lelang tidak melunasi harga lelang yang telah di ajukan, hingga sampai dengan batas waktu yang telah di tentukan oleh KPKNL Semarang. Sehingga Pengadilan Agama Demak mengajukan permohonan Lelang ulang kepada

KPKNL Semarang Nomor W11-A15/3678/PL.06/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.

### C.13. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset tetap : Rp  
(162.399.373)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp(162.399.373) dan Rp.0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018
1	Aset tak Berwujud	(2.500.000)	0
2	Aset Lain-lain	(159.899.373)	0
	<b>Jumlah</b>	<b>(162.399.373)</b>	<b>0</b>

### C.14. Uang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada  
Pihak Ketiga:  
Rp 13.749.850*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp13.749.850,- dan Rp13.550.110,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Kepada Pihak Ke Tiga 2019	13.749.850	Beban Listrik, PDAM, Telpon, Surat Kabar Bulan Desember, Kekurangan Gaji dan uang makan
2	Utang Kepada Pihak Ke Tiga 2018	13.550.110	Beban Listrik, PDAM, Telpon, Internet, Surat Kabar Bulan Desember



*Uang Muka  
dari KPPN:  
Rp 0*

### **C.15. Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

### **C.16. Ekuitas**

*Cadangan  
Piutang:  
Rp18.269.239.718*

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp18.269.239.718,- dan Rp16.137.531.972. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2019 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 2.095.330.030,- 12,98% dari nilai per 31 Desember TA 2018. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.18.269.239.718,-, sedangkan per 31 Desember TA 2018 tercatat sebesar Rp.16.137.531972,-.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

**Pendapatan PNPB : Rp468.900** Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp468.900,- dan Rp694.897,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik (turun)%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	468.900	694.897	32,51
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	(100,00)
<b>Total Pendapatan</b>		<b>468.900</b>	<b>694.897</b>	<b>(95,36)</b>

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari sewa gedung dan bangunan pada Rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Demak di Jl. Sultan Fattah No.12 Demak.

### D.2. Beban Pegawai

**Beban Pegawai : Rp 3.319.077.827** Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.319.077.827,- dan Rp3.978.150.052,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik(turun)%
1.	Beban Gaji Pokok PNS	1.313.457.820	1.343.626.700	(2,24)
2.	Beban Pembulatan Gaji PNS	18.254	18.663	(2,19)
3.	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	114.775.570	111.904.250	2,56
4.	Beban Tunj. Anak PNS	38.198.302	38.972.432	(1,98)
5.	Beban Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	0
6.	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.360.510.000	1.923.640.000	(29,27)
7.	Beban Tunj. PPh PNS	169.640.001	228.325.747	(25,70)
8.	Beban Tunj. Beras PNS	69.812.880	72.637.260	(3,88)
9.	Beban Uang Makan PNS	214.230.000	222.625.000	(3,77)
10.	Beban Tunj. Umum PNS	2.035.000	0	100,00
	<b>Total</b>	<b>3.319.077.827</b>	<b>3.978.150.052</b>	<b>(16,57)</b>

### D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan :  
Rp32.027.850*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp32.027.850,- dan Rp23.027.335,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	32.027.850	23.027.335	39,08
2.	Beban Persediaan Strategis untuk Berjaga-jaga	0	0	0
3.	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>32.027.850</b>	<b>23.027.335</b>	<b>39,08</b>

### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang  
dan Jasa :  
Rp551.274.807*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp551.274.807,-

dan Rp465.859.466,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	296.970.196	248.324.892	19,58
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	490.500	2.999.000	(83,64)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	40.800.000	40.800.000	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	47.812.200	11.996.000	298,56
Beban Bahan	0	8.901.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	109.795.353	113.623.700	(3,36)
Beban Langganan Telepon	3.995.378	5.746.314	(30,47)
Beban Langganan Air	37.011.180	19.998.560	85,06
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	13.470.000	(100,00)
Beban Sewa	14.400.000	0	100
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>551.274.807</b>	<b>465.859.466</b>	<b>18,33</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan:  
Rp293.548.650*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp293.548.650,- dan Rp281.252.783,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	218.103.900	205.305.500	6,23
Beban Pemeliharaan	75.444.750	75.947.283	(0,66)

Peralatan dan Mesin			
Total Beban Pemeliharaan	293.548.650	281.252.783	4,37

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas :  
Rp53.090.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp53.090.000,- dan Rp55.656.787,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

### Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	53.090.000	50.596.787	4,92
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	5.060.000	(100,00)
Total Beban Perjalanan Dinas	53.090.000	55.656.787	(4,61)

## D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban  
Penyusutan  
dan Amortisasi:  
Rp437.151.548*

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp437.151.548,- dan Rp Rp359.155.448. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

### Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	200.367.536	166.800.522	20,12
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	236.784.012	192.354.926	23,09

Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	437.151.548	359.155.448	21,71
---------------------------------------	-------------	-------------	-------

## D.8. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0,-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

## D.9. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Rincian Kegiatan Non Operasioanal per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tanhun Anggaran Yang Lalu	0	51	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2.039.250	223.185	813,50
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	361.650	465.250	(22,27)
Surplus (Defisit) dai Kegiatan Non Operasional	1.677.600	(242.014)	793,20

## D.10. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : Rp0,-*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal*  
*Rp.16.137.531.972* Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp16.137.531.972,- dan Rp10.543.067.172,-.

### E.2. Surplus (defisit) LO

*Defisit LO*  
*Rp.(4.684.024.182)* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp(4.684.024.182),- dan Rp(5.162.649.039). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian Nilai Aset*  
*Rp.0,00* Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai Persediaan*  
*Rp.0,00* Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi Aset Tetap*  
*Rp.2.395.970.000* Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.395.970.000,- dan Rp6.382.909.271,-. Revaluasi Aset tersebut berasal Nilai tanah dan gedung bangunan.

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

**Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi** Rp.(41.489.906) Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(41.489.906),- dan Rp(711.516.080),-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

**Koreksi Lain-lain** Rp.0,- Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

### E.4. Transaksi Antar Entitas

**Transaksi Antar Entitas** Rp.4.461.251.834 Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.461.251.834,- dan Rp5.085.720.648,-.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.



**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(468.900)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.290.818.544
Transfer Masuk	170.902.190
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>4.461.251.834</b>

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp468.900,- sedangkan DKEL sebesar Rp4.290.818.544,-.

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sebesar Rp.170.902.190,- dari total Rp.170.902.190,- yang diterima sepanjang tahun 2019 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, adalah Rp.170.902.190,-.

#### **E.3. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp18.269.239.718,- dan Rp Rp16.137.531.972,-.

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2019 pada Pengadilan Agama Demak.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Terdapat temuan pemeriksaan BPK RI.

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dengan total Rp.13.749.850,- dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat Beban langganan listrik bulan Desember 2019, sebesar Rp.10.103.886.
2. Terdapat Beban langganan telpon bulan Desember 2019, sebesar Rp.391.503.
3. Terdapat Beban langganan Air bulan Desember 2019, sebesar Rp.964.020.
4. Terdapat Beban langganan Koran bulan Desember 2019, sebesar Rp.290.000.
5. Terdapat Beban Belanja Pegawai Uang Makan bulan Desember 2019, sebesar Rp.820.000.
6. Terdapat Beban Belanja Pegawai Gaji Pokok bulan Desember 2019, sebesar Rp.1.035.200.
7. Terdapat Beban Belanja Pegawai Pembulatan Gaji bulan Desember 2019, sebesar Rp.313.
8. Terdapat Beban Belanja Pegawai Tunj. Suami/Istri bulan Desember 2019, sebesar Rp.103.520.
9. Terdapat Beban Belanja Pegawai Tunj Anak bulan Desember 2019, sebesar Rp.41.408.

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Demak adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) A/C 0016-01-000299-30-1 a.n. BPG 129 PENGADILAN AGAMA DEMAK yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.

2. BRI SYARIAH A/C 1041370568 a.n. RPL 129 PDT PA DEMAK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara Pengadilan Agama Demak dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.416.312.008,-.

#### F.2.4. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Demak Tahun Anggaran 2019 bernomor : DIPA-005.01-2.400942/2019 tanggal 05 Desember 2019 berjumlah sebesar Rp5.884.869.000,00 (Lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. DIPA Awal

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
<b>005.01.01</b>		
<b>1064.001.051</b>	524111	15.990.000,00
<b>1066.994.001</b>	511111	1.239.218.000,00
	511119	21.000,00
	511121	109.347.000,00
	511122	38.692.000,00
	511123	33.800.000,00
	511124	2.569.905.000,00
	511125	449.732.000,00
	511126	92.094.000,00
	511129	237.600.000,00
	511151	9.068.000,00
<b>1066.994.002</b>	521111	200.900.000,00
	521119	12.000.000,00
	521811	20.320.000,00
	521111	21.784.000,00
	521114	3.000.000,00
	522111	120.000.000,00
	522112	9.000.000,00
	522113	12.000.000,00

	521811	1.200.000,00
	523111	222.322.000,00
	523121	85.760.000,00
	521115	42.000.000,00
	521119	11.996.000,00
	521119	5.190.000,00
	521119	6.120.000,00
	524111	37.300.000,00
<b>1071.951.051</b>	532111	25.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>5.631.269.000,00</b>

2. Revisi DIPA 1 (Tanggal 29 Mei 2019)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 1

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
<b>005.01.01</b>		
<b>1064.001.051</b>	524111	15.990.000,00
<b>1066.994.001</b>	511111	1.239.218.000,00
	511119	21.000,00
	511121	109.347.000,00
	511122	38.692.000,00
	511123	33.800.000,00
	511124	2.569.905.000,00
	511125	449.732.000,00
	511126	92.094.000,00
	511129	237.600.000,00
	511151	9.068.000,00
<b>1066.994.002</b>	521111	200.900.000,00
	521119	12.000.000,00
	521811	20.320.000,00
	521111	100.835.000,00
	521114	3.000.000,00

	522111	120.000.000,00
	522112	9.000.000,00
	522113	12.000.000,00
	521811	1.200.000,00
	523111	222.322.000,00
	523121	85.760.000,00
	521115	42.000.000,00
	521119	11.996.000,00
	521119	5.190.000,00
	521119	6.120.000,00
	524111	37.300.000,00
<b>1071.951.051</b>	532111	50.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>5.735.320.000,00</b>

3. Revisi DIPA 2 (Tanggal 26 Juni 2019)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 2

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
<b>005.01.01</b>		
<b>1064.001.051</b>	524111	15.990.000,00
<b>1066.994.001</b>	511111	1.239.218.000,00
	511119	21.000,00
	511121	109.347.000,00
	511122	38.692.000,00
	511123	33.800.000,00
	511124	2.569.905.000,00
	511125	449.732.000,00
	511126	92.094.000,00
	511129	237.600.000,00
	511151	9.068.000,00
<b>1066.994.002</b>	521111	201.900.000,00
	521119	26.000.000,00

	521811	19.374.000,00
	521111	100.835.000,00
	521114	3.000.000,00
	522111	120.000.000,00
	522112	9.000.000,00
	522113	12.000.000,00
	521811	1.200.000,00
	523111	214.368.000,00
	523121	80.770.000,00
	521115	40.800.000,00
	521119	11.996.000,00
	521119	5.190.000,00
	521119	6.120.000,00
	524111	37.300.000,00
<b>1071.951.051</b>	532111	50.000.000,00
	<b>Total</b>	<b><u>5.735.320.000,00</u></b>

4. Revisi DIPA 3 (Tanggal 26 Juli 2019)

Terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 3 oleh Eselon 1.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
<b>005.01.01</b>		
<b>1064.001.051</b>	524111	15.990.000,00
<b>1066.994.001</b>	511111	1.239.218.000,00
	511119	21.000,00
	511121	109.347.000,00
	511122	38.692.000,00
	511123	33.800.000,00
	511124	2.569.905.000,00
	511125	449.732.000,00
	511126	92.094.000,00

	511129	237.600.000,00
	511151	9.068.000,00
<b>1066.994.002</b>	521111	201.900.000,00
	521119	26.000.000,00
	521811	19.374.000,00
	521111	100.835.000,00
	521114	3.000.000,00
	522111	124.900.000,00
	522112	9.000.000,00
	522113	12.000.000,00
	521811	1.200.000,00
	523111	214.368.000,00
	523121	80.770.000,00
	521115	40.800.000,00
	521119	11.996.000,00
	521119	5.190.000,00
	521119	6.120.000,00
	524111	37.300.000,00
<b>1071.951.051</b>	532111	50.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>5.740.220.000,00</b>

5. Revisi DIPA 4 (Tanggal 19 Agustus 2019)

Terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 4 oleh eselon satu.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
<b>005.01.01</b>		
<b>1064.001.051</b>	524111	15.990.000,00
<b>1066.994.001</b>	511111	1.239.218.000,00
	511119	21.000,00
	511121	109.347.000,00
	511122	38.692.000,00

	511123	33.800.000,00
	511124	2.569.905.000,00
	511125	449.732.000,00
	511126	92.094.000,00
	511129	237.600.000,00
	511151	9.068.000,00
<b>1066.994.002</b>	521111	201.900.000,00
	521119	26.000.000,00
	521811	19.374.000,00
	521111	100.835.000,00
	521114	3.000.000,00
	522111	124.900.000,00
	522112	9.000.000,00
	522113	12.000.000,00
	521811	1.200.000,00
	523111	214.368.000,00
	523121	80.770.000,00
	521115	40.800.000,00
	521119	11.996.000,00
	521119	5.190.000,00
	521119	6.120.000,00
	524111	37.300.000,00
	522141	27.000.000,00
<b>1071.951.051</b>	532111	50.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>5.767.220.000,00</b>

6. Revisi DIPA 5 (Tanggal 19 Agustus 2019)

Tidak Terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 5.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
<b>005.01.01</b>		
<b>1064.001.051</b>	524111	15.990.000,00



<b>1066.994.001</b>	511111	1.239.218.000,00
	511119	21.000,00
	511121	109.347.000,00
	511122	38.692.000,00
	511123	33.800.000,00
	511124	2.569.905.000,00
	511125	449.732.000,00
	511126	92.094.000,00
	511129	237.600.000,00
	511151	9.068.000,00
<b>1066.994.002</b>	521111	201.900.000,00
	521119	28.784.000,00
	521811	19.362.000,00
	521111	100.835.000,00
	521114	492.000,00
	522111	124.900.000,00
	522112	4.680.000,00
	522113	26.400.000,00
	521811	1.200.000,00
	523111	210.322.000,00
	523121	74.770.000,00
	521115	40.800.000,00
	521119	11.996.000,00
	521119	4.992.000,00
	521119	6.120.000,00
	524111	37.300.000,00
	522141	27.000.000,00
<b>1071.951.051</b>	532111	50.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>5.767.220.000,00</b>

7. Revisi DIPA 6 (Tanggal 05 November 2019)

Terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 6 oleh eselon satu.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
<b>005.01.01</b>		
<b>1064.001.051</b>	524111	15.990.000,00
<b>1066.994.001</b>	511111	1.319.665.000,00
	511119	21.000,00
	511121	114.402.000,00
	511122	38.499.000,00
	511123	33.800.000,00
	511124	1.361.190.000,00
	511125	167.725.000,00
	511126	70.248.000,00
	511129	213.414.000,00
	511151	2.035.000,00
<b>1066.994.002</b>	521111	201.900.000,00
	521119	28.784.000,00
	521811	19.362.000,00
	521111	100.835.000,00
	521114	492.000,00
	522111	124.900.000,00
	522112	4.680.000,00
	522113	26.400.000,00
	521811	1.200.000,00
	523111	210.322.000,00
	523121	74.770.000,00
	521115	40.800.000,00
	521119	11.996.000,00
	521119	4.992.000,00
	521119	6.120.000,00
	524111	37.300.000,00

	522141	27.000.000,00
<b>1071.951.051</b>	532111	50.000.000,00
	<b>Total</b>	<b><u>4.311.754.000,00</u></b>

8. Revisi DIPA 7 (Tanggal 19 November 2019)

Tidak Terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 7.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
<b>005.01.01</b>		
<b>1064.001.051</b>	524111	15.990.000,00
<b>1066.994.001</b>	511111	1.316.165.000,00
	511119	21.000,00
	511121	114.814.000,00
	511122	38.499.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.361.690.000,00
	511125	170.725.000,00
	511126	70.248.000,00
	511129	213.414.000,00
	511151	2.035.000,00
<b>1066.994.002</b>	521111	201.082.000,00
	521119	25.600.000,00
	521811	22.833.000,00
	521111	97.509.000,00
	521114	492.000,00
	522111	110.884.000,00
	522112	4.164.000,00
	522113	36.876.000,00
	521811	1.200.000,00
	523111	218.112.000,00
	523121	75.750.000,00
	521115	40.800.000,00

	521119	11.996.000,00
	521119	4.135.000,00
	521119	6.120.000,00
	524111	37.200.000,00
	522141	27.000.000,00
<b>1071.951.051</b>	532111	50.000.000,00
	<b>Total</b>	<b><u>4.311.754.000,00</u></b>

9. Revisi DIPA 8 (Tanggal 20 Desember 2019)

Terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 8 oleh eselon satu.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
<b>005.01.01</b>		
<b>1064.001.051</b>	524111	15.990.000,00
<b>1066.994.001</b>	511111	1.313.458.000,00
	511119	21.000,00
	511121	114.776.000,00
	511122	38.199.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.360.510.000,00
	511125	169.641.000,00
	511126	69.813.000,00
	511129	213.414.000,00
	511151	2.035.000,00
<b>1066.994.002</b>	521111	201.082.000,00
	521119	25.600.000,00
	521811	22.833.000,00
	521111	97.509.000,00
	521114	492.000,00
	522111	110.884.000,00
	522112	4.164.000,00
	522113	36.876.000,00

	521811	1.200.000,00
	523111	218.112.000,00
	523121	75.750.000,00
	521115	40.800.000,00
	521119	11.996.000,00
	521119	4.135.000,00
	521119	6.120.000,00
	524111	37.200.000,00
	522141	27.000.000,00
<b>1071.951.051</b>	532111	50.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>4.306.010.000,00</b>

### F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB:

1. Terdapat ralat/koreksi SPM pada tanggal 1 Agustus 2019, Nomor SPM: 00058/400942/2019 tanggal 02 Agustus 2019, dikarenakan perbedaan dalam penulisan kode pemotongan SPM.

Bagan Akun Standar			
BAS Semula	Nilai Semula	BAS Koreksi	Nilai Koreksi
Satker : 400942	Rp 9.300.000	Satker : 400942	Rp 9.300.000
KPPN : 129		KPPN : 129	
Akun : 524111,521111		Akun : 524111	
Program : 01		Program : 01	
Kegiatan/Output : 1066.994		Kegiatan/Output : 1066.994	
Sumber Dana : A		Sumber Dana : A	
Cara Tarik : 0		Cara Tarik : 0	
Register P/H : 00000001		Register P/H : 00000001	
Kewenangan : KD		Kewenangan : KD	
Lokasi : 03.03		Lokasi : 03.03	
<b>Total</b>	<b>Rp 9.300.000</b>	<b>Total</b>	<b>Rp 9.300.000</b>

## **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

---

Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian aplikasi SAIBA 2019. Pada bulan Januari 2019 merupakan jurnal balik dari penyajian jurnal akrual tahun anggaran yang lalu.

# *DAFTAR DAN LAMPIRAN*

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*



Pengadilan Agama Demak

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap  
 untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2018	2019	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2019
<b>A.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>						
1	Alat Bantu	7	99.750.000	99.750.000	0	99.750.000	0
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	410.314.117	358.956.973	25.678.572	384.635.545	25.678.572
3	Alat Kantor	5	168.022.998	91.052.698	20.606.600	111.659.298	56.363.700
4	Alat Rumah Tangga	5	694.705.497	468.829.549	56.315.100	525.144.649	169.560.848
5	Alat Studio	5	47.913.000	15.568.000	8.155.400	23.724.300	24.188.700
6	Alat Komunikasi	5	10.837.316	10.837.316	0	10.837.316	0
7	Komputer Unit	10	378.716.376	157.289.717	59.468.408	216.758.125	161.958.251
8	Peralatan Komputer	4	193.449.237	74.521.967	27.931.456	102.453.423	90.995.814
9	Alat Kerja Penerbangan	4	49.060.000	7.359.000	4.906.000	12.265.000	36.795.000
1	Peralatan Olah Raga	3	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
<b>B.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	6.221.712.089	177.764.303	220.066.776	439.320.985	5.782.391.104

2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	133.668.000	7.426.000	7.426.000	14.852.000	118.816.000
3	Tugu/tanda Batas	50	307.089.000	9.291.236	9.291.236	18.582.472	288.506.528
<b>C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>							
1	Jalan	10	-	-	-	-	-
2	Jaringan Air Minum	30	-	-	-	-	-
3	Jaringan Listrik	40	-	-	-	-	-
4	Jaringan Telepon	20	-	-	-	-	-
<b>D. Aset Tetap Lainnya</b>							
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	-	-	-
<b>E. Aset Tetap yang Tidak Digunakan</b>							
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	-	-	-	-	-
2	Alat Kantor	5	7.694.485	-	-	7.694.485	0
3	Alat Rumah Tangga	5	26.901.054	-	-	26.901.054	0
4	Alat Komunikasi	5	127.098	-	-	127.098	0
5	Komputer Unit	4	103.958.369	-	-	103.958.369	0
6	Peralatan Komputer	4	21.218.367	-	-	21.218.367	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			8.876.637.003	1.640.047.032	439.845.548	2.121.382.486	6.755.254.517
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			8.876.637.003	1.640.047.032	439.845.548	2.121.382.486	6.755.254.517

## *B. Daftar Hibah Langsung*



**Pengadilan Agama Demak**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	<b>NIHIL</b>	U					
	Jumlah :						